

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Nilai Perusahaan**

Secara umum tujuan pendirian perusahaan dapat dibedakan menjadi tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis berhubungan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya, seperti berupaya menciptakan laba, menciptakan pelanggan, dan menjalankan upaya-upaya pengembangan dengan memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat dalam hal produk yang diinginkan, kualitas, harga, kuantitas, waktu pelayanan, kegunaan produk, dan sebagainya. Untuk tujuan sosial, perusahaan diharapkan memerhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberikan kepuasan kepada keinginan konsumen ataupun pelanggan [21].

Meskipun keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan, tetapi tujuan-tujuan lain hanya akan tercapai jika perusahaan mampu tetap hidup berkembang dan memperoleh keuntungan. Perusahaan yang berorientasi pada perolehan keuntungan, pada umumnya akan memfokuskan kegiatannya untuk meningkatkan nilai perusahaan hingga mencapai maksimum (laba sebagai tolak ukur keberhasilan). Dalam hal ini, nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor sehingga ia mau membayarnya, jika suatu perusahaan akan dijual. Bagi perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat (*go public*), indikator nilai perusahaan adalah harga saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Pendapat ini didasarkan atas pemikiran bahwa peningkatan harga saham identik dengan peningkatan kemakmuran para pemegang saham, dan peningkatan harga saham identik dengan peningkatan nilai perusahaan. Meskipun demikian, tidak berarti nilai perusahaan sama dengan harga saham. Peningkatan nilai perusahaan identik dengan peningkatan harga saham jika besarnya nilai utang dipegang konstan [21].

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan di dalam perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan mampu

meningkatkan kemakmuran pemegang saham, sebab total kemakmuran pemegang saham diukur dengan total kepemilikan saham dikalikan dengan harga pasar per lembar saham [22]. Pengukuran penilaian yang terbukti paling signifikan dalam menetapkan saham-saham pemenang adalah rasio harga terhadap nilai buku (*the price to book ratio*), yang diukur dengan cara membagi harga pasar saham dengan nilai buku per saham [23]. Nilai pasar adalah nilai saham yang ditunjukkan melalui harga saham di pasar, sedangkan nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan data akuntansi perusahaan penerbit saham (emiten) [24].

Rasio Harga terhadap Nilai Buku atau *Price to Book Value Ratio* (PBV) merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham [25]. Rasio ini lebih berfokus pada nilai ekuitas perusahaan, dimana nilai buku saham dihasilkan dari ekuitas dibagi rata-rata jumlah saham yang beredar. Semakin tinggi nilai PBV, semakin mahal pula harga sahamnya [26].

Rasio PBV dapat dirumuskan sebagai berikut [25]:

$$\text{Price to Book Value (PBV)} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}} \quad (2.1)$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah *overvalued* atau *undervalued*. Semakin rendah nilai PBV suatu saham maka saham tersebut dikategorikan *undervalued*, di mana sangat baik untuk investasi jangka panjang. Nilai rendah PBV ini harus disebabkan oleh turunnya harga saham, sehingga harga saham berada di bawah nilai buku atau nilai sebenarnya. Namun, rendahnya nilai PBV juga dapat mengindikasikan menurunnya kualitas dan kinerja fundamental perusahaan. Oleh karena itu, nilai PBV harus dibandingkan juga dengan PBV industrinya. Sebaliknya, semakin tinggi nilai PBV maka saham dikategorikan *overvalued*, yang mengindikasikan persepsi pasar yang berlebihan terhadap nilai perusahaan [26]. Untuk perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai di atas satu, yang menunjukkan nilai pasar saham lebih besar dari pada nilai bukunya [27].

Manfaat lain PBV yaitu bahwa rasio ini dapat memberikan sinyal kepada investor mengenai apakah harga yang diinvestasikan investor kepada perusahaan tersebut terlalu tinggi atau tidak jika diasumsikan perusahaan bangkrut tiba-tiba.

Karena jika perusahaan bangkrut, maka kewajiban utama perusahaan adalah terlebih dahulu membayar kewajiban dan kemudian sisa aktiva (jika ada) dibagikan kepada pemegang saham [26].

Nilai perusahaan yang diprosikan dengan PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai kinerja suatu perusahaan, yang diukur melalui perbandingan harga pasar saham dengan nilai buku saham perusahaan. Rasio PBV dapat digunakan oleh investor sebagai sinyal untuk berinvestasi di suatu perusahaan dengan melihat mahal murahnya saham perusahaan tersebut. Makin tinggi rasio ini artinya pasar akan semakin percaya akan prospek perusahaan tersebut, sebaliknya semakin rendah rasio ini menunjukkan saham perusahaan tersebut kurang diminati pasar.

### 2.1.2. Likuiditas

Dalam praktek, tidak sedikit dijumpai perusahaan yang kerap kali mengalami kesulitan finansial sehingga tidak mampu mendanai kegiatan operasionalnya maupun dalam melakukan pembayaran utang. Perusahaan yang tidak memiliki cukup dana dalam melunasi kewajibannya hampir dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan sanggup melunasi seluruh utang-utangnya kepada kreditor secara tepat waktu pada saat jatuh tempo. Untuk jangka panjang, hal ini akan mengganggu kesinambungan bisnis perusahaan, serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan kreditor terhadap perusahaan di masa mendatang [15].

Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perusahaan tidak mampu membayar utang jangka pendeknya karena memang perusahaan tersebut tidak memiliki dana sama sekali. Atau yang ke dua, bisa juga bahwa sesungguhnya perusahaan tidak mengalami kesulitan finansial, hanya saja pada saat terdapat utang yang jatuh tempo, perusahaan masih perlu menunggu untuk mencairkan beberapa aset lancar lainnya menjadi kas, seperti melakukan penagihan piutang usaha, menjual persediaan barang dagang, atau bahkan menjual beberapa sekuritas jangka pendeknya [15].

Di sisi lain, tidak jarang pula dijumpai perusahaan yang justru memiliki kelebihan kas secara berlimpah dan tidak terpakai (*idle cash*) dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini juga tidak baik karena berarti bahwa manajemen dianggap tidak mampu mengoptimalkan penggunaan kas perusahaan yang sesungguhnya dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan ekspansi bisnis dan investasi, baik investasi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang [15].

Kekurangan ataupun kelebihan kas tersebut sesungguhnya dapat diatasi jika manajemen perusahaan senantiasa melakukan analisis rasio keuangan secara berkala sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi perkembangan kondisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan manajemen perusahaan untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan, efisiensi, ataupun antisipasi terhadap kemungkinan memburuknya kondisi keuangan perusahaan, termasuk memanfaatkan kelebihan kas yang ada untuk kepentingan dan tujuan strategi perusahaan. Analisis keuangan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dapat dilakukan dengan menggunakan rasio likuiditas [15].

Salah satu rasio likuiditas ini adalah Rasio Lancar atau *Current Ratio*. *Current ratio* dapat dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Aktiva lancar meliputi kas dan aset-aset yang diperkirakan perusahaan akan diuangkan atau dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun neraca. Kewajiban lancar meliputi kewajiban yang membutuhkan kas (atau pemberian jasa) dalam satu tahun [28].

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \quad (2.2)$$

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang paling sering digunakan untuk mengukur likuiditas jangka pendek suatu perusahaan. *Current ratio* menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban lancarnya. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk berapa kali atau dalam bentuk persentasi [29].

Secara sederhana, tujuan *current ratio* yaitu untuk membandingkan apa yang perusahaan miliki dengan apa yang sedang dalam hutang perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah hutang yang dimiliki lebih besar daripada yang sanggup dibayar, atau apakah perusahaan telah memiliki aset yang cukup untuk menutupi hutangnya [30]. Selain itu, melalui *current ratio* akan diketahui hubungan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar, sehingga dapat dilakukan perbandingan

antara perusahaan-perusahaan dengan skala yang berbeda [31]. *Current ratio* yang lebih aman adalah jika berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar [29]. Namun, *current ratio* yang terlalu tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis justru menunjukkan pengelolaan aktiva lancar yang kurang efektif [31].

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Penggunaan rasio likuiditas dapat membantu perusahaan mengetahui kekurangan maupun kelebihan kas dalam perusahaan, sehingga manajemen mampu lebih efektif mengelola aktiva lancarnya. Pengelolaan aktiva lancar yang efektif akan berdampak baik terhadap kinerja perusahaan, sehingga ikut meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar nilai rasio likuiditas menunjukkan keadaan perusahaan yang semakin likuid, yang berarti kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya semakin baik. Sebaliknya semakin rendah rasio likuiditas menunjukkan semakin buruk kemampuan perusahaan membayar kewajibannya.

### 2.1.3. Profitabilitas

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan, dengan cara menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya [15].

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio

profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan [15].

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri [15].

Biasanya, penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Salah satunya adalah rasio Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*), yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas [15].

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}} \quad (2.3)$$

Semakin tinggi rasio laba sebelum pajak dengan modal rata-rata yang digunakan, maka tingkat kinerja keuangan perusahaan akan semakin tinggi jika faktor lainnya juga baik [32], sehingga memberikan poin tambah terhadap nilai perusahaan. Rata-rata industri untuk ROE adalah 40% [33], yang berarti setiap 1 rupiah ekuitas yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan 0,4 rupiah laba bersih bagi perusahaan.

Peningkatan ROE dari waktu ke waktu menggambarkan bahwa performa manajemen dalam mengelola perusahaan telah meningkat. Hal ini dikarenakan ROE meningkat ketika laba bersih perusahaan bertambah, sedangkan total ekuitas tetap sama. Namun peningkatan ROE dapat dimanipulasi dengan menambah jumlah

kewajiban, sehingga mengakibatkan jumlah ekuitas menjadi berkurang. Dengan cara ini, ROE akan terlihat meningkat meskipun laba bersih masih sama dengan periode sebelumnya. Di sisi lain, ketika laba statis, ROE juga dapat menurun disebabkan karena penurunan pesat pada kewajiban perusahaan. Hal ini terjadi bila perusahaan melunasi sebagian besar kewajibannya dalam suatu periode. Oleh karena itu, pengukuran ROE sebaiknya dilakukan beserta dengan pengamatan terhadap *Return on Assets* (ROA) [34].

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada suatu periode. Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROE menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Kesuksesan perusahaan dalam mengelola ekuitasnya akan menghasilkan rasio profitabilitas yang lebih tinggi, yang berarti semakin baik kinerja perusahaan. Sebaliknya, rasio profitabilitas yang rendah menunjukkan pengelolaan ekuitas yang kurang baik. Melalui rasio profitabilitas manajemen dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan.

#### 2.1.4. Solvabilitas

Dalam menjalankan kegiatannya, setiap perusahaan membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Dana ini tidak hanya dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaan saja, melainkan juga untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan, seperti biaya untuk mengganti atau membeli tambahan peralatan dan mesin produksi yang baru, membuka kantor cabang baru, melakukan ekspansi bisnis, dan sebagainya. Seorang manajer keuangan yang handal dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk kepiawaian dalam mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan perusahaan [15].

Penting bagi manajer keuangan untuk mensiasati kebutuhan dana perusahaan dengan cara melakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pinjaman dan modal. Besarnya penggunaan dana untuk masing-masing sumber pembiayaan harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak membebani perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kemampuan, tujuan, dan strategi

perusahaan. Kombinasi penggunaan dana ini dapat ditunjukkan melalui rasio solvabilitas atau rasio struktur modal atau rasio *leverage* [15].

Rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang, atau rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Hasil perhitungan rasio solvabilitas diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan [15].

Salah satu jenis rasio profitabilitas yaitu Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*), yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor [15].

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.4)$$

Rasio DER juga digunakan sebagai pengukuran resiko dan strategi perusahaan. Sebagai pengukuran resiko, sebab dalam perhitungan rasio ini, nilai ekuitas yang digunakan merupakan hasil dari aktiva dikurangi kewajiban. Sehingga secara tidak langsung, rasio ini dapat menunjukkan jumlah aktiva yang tersedia untuk menutupi hutang. Sebagai pengukuran strategi, sebab rasio ini menggambarkan agresivitas perusahaan melalui kebijakan hutangnya. Rasio ini mengukur besarnya pembiayaan dari pinjaman dibandingkan pembiayaan dari modal. Perusahaan yang agresif cenderung memilih pembiayaan dari pinjaman untuk mendorong pertumbuhan perusahaan daripada bergantung pada pembiayaan dari modal [34].

Semakin tinggi DER maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Akan lebih aman bagi kreditor apabila memberikan pinjaman kepada debitor yang memiliki tingkat DER yang rendah karena hal ini berarti bahwa akan semakin besar jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang [15]. Selain itu, jika suatu perusahaan mampu memenuhi kewajiban finansialnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi maka dapat dikatakan kondisi tingkat kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan sehat [32]. Rata-rata industri untuk DER adalah 80% [33], yang berarti setiap 0,8 rupiah kewajiban perusahaan dijamin dengan 1 rupiah ekuitas perusahaan.

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajibannya apabila dilikuidasi. Melalui solvabilitas yang diprosikan dengan DER, dapat diketahui berapa jumlah modal perusahaan yang dapat dijadikan jaminan atas utang perusahaan. Semakin rendah rasio struktur modal solvabilitas menunjukkan keadaan perusahaan solvabel, yang berarti perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk melunasi kewajibannya. Sebaliknya rasio solvabilitas yang tinggi menunjukkan tingkat utang yang tinggi dibandingkan dengan modal perusahaan, yang berarti keadaan perusahaan insolvel. Perusahaan yang solvabel menunjukkan kinerja yang sehat sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan.

### **2.1.5. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai aktiva [35]. Ukuran perusahaan dalam menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan juga dapat ditunjukkan dari total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total aktiva [36]. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) [37].

Perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki kemudahan memasuki pasar modal, sehingga mengurangi ketergantungan dana yang bersumber dari dalam perusahaan serta memungkinkan pembayaran deviden dengan tingkat yang lebih tinggi [38]. Kemudahan aksesibilitas ke pasar modal dapat diartikan sebagai adanya

kemampuan perusahaan dalam menciptakan hutang atau mengumpulkan dana yang lebih besar dengan catatan perusahaan tersebut memiliki rasio pembayaran deviden yang lebih tinggi daripada perusahaan lain. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan keputusan pendanaan untuk memenuhi ukuran atau besarnya aset perusahaan [39]. Dengan ukuran perusahaan yang lebih besar, perusahaan memiliki kewajiban yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi investor. Hal ini dilakukan perusahaan dengan memberikan pengungkapan yang lebih rinci dalam laporannya [40].

Ukuran besar kecilnya perusahaan dapat diukur melalui logaritma natural dari total aktiva [41]. Logaritma natural adalah logaritma dengan menggunakan basis bilangan e, yaitu bilangan nyata dengan desimal tak terbatas. Sampai dengan 10 angka di belakang koma, nilainya adalah 2,7182818284 [42]. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan logaritma natural total aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan logaritma natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya [43]. Menurut ketentuan UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa usaha mikro memiliki aset maksimal Rp. 50.000.000, usaha kecil > Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000, usaha menengah > Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 dan usaha besar > Rp. 10.000.000.000 [44].

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln(Total\ Aktiva) \quad (2.5)$$

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan melalui berbagai ukuran, yang salah satunya adalah total aktiva. Perusahaan besar cenderung lebih baik dalam melaksanakan pelaporan keuangan dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sebab perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih luas dari publik. Pelaporan keuangan yang lebih baik oleh perusahaan memungkinkan investor untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai keadaan perusahaan, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.

### 2.1.6. Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri atas 3 (tiga) orang antara lain Komisaris Independen dan pihak independen (yang berasal dari luar perusahaan). Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap juga sebagai anggota [17].

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan [17].

Komite Audit wajib melaporkan hasil penelaahannya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan tersebut selesai dibuat. Komite Audit wajib menyampaikan laporan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan [18].

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan

eksternal. Keberadaan Komite Audit diyakini mampu mengurangi aktivitas kecurangan pada laporan keuangan sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan. Komite Audit dapat diukur dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit yang terdapat di perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit} \quad (2.6)$$

### 2.1.7. Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali adalah pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih saham perusahaan atau yang memiliki kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengelolaan atau kebijakan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20% [18]. Komisaris Independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali, dimana jumlah Komisaris Independen harus sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, antara lain:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dalam emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, anggota atau perusahaan publik tersebut;
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Dewan Komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut [17].

Masa Jabatan Komisaris Independen antara lain:

- a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- b. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya [17].

Dewan Komisaris wajib memberikan rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada seluruh anggota direksi perusahaan tercatat yang bersangkutan [18]. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen serta untuk menjaga *fairness* dan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya [45].

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris Independen diharapkan mampu melindungi kepentingan para pemegang saham melalui penciptaan objektivitas dan independensi dalam perusahaan, serta memberikan perbaikan dan saran guna kemajuan perusahaan, sehingga kehadiran Komisaris Independen akan meningkatkan nilai perusahaan. Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah Komisaris Independen terhadap jumlah anggota Dewan Komisaris.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris}} \quad (2.7)$$

### 2.1.8. Kualitas Audit

Kualitas adalah tingkat atau derajat baik buruknya mutu sesuatu, baik berupa barang atau jasa [13], sedangkan audit adalah pembuktian independen yang dilakukan oleh auditor, yang menyatakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan [46]. Tujuan audit adalah meningkatkan tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan tersebut.

Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, yaitu pada umumnya mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Suatu audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan persyaratan etika yang relevan memungkinkan auditor memberikan pendapat tersebut [13].

Kualitas audit merupakan suatu probabilitas seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya [19]. Kualitas audit menunjukkan ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien. Kemampuan auditor menemukan pelanggaran akan tergantung pada kemampuan menggunakan teknologi, prosedur audit yang digunakan, luasnya sampel audit dan lain-lain. Adapun kemampuan untuk melaporkan pelanggaran akan tergantung pada apakah auditor memiliki sikap independen terhadap klien [47].

Kualitas audit terdiri atas dua komponen, yaitu kompetensi auditor dan independensi auditor. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dll [13]. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Independensi dianggap sebagai karakteristik auditor yang paling kritis. Alasan bahwa banyak pemakai berbeda yang ingin bergantung pada laporan akuntan publik untuk kewajaran dari laporan keuangan adalah harapan dari sudut pandang yang tidak bias [19]. Kedua kualitas tersebut hanya dimiliki oleh kantor akuntan yang berukuran besar, sebab tidak ada satu klien yang penting untuk satu kantor akuntan berukuran besar, dan auditor memiliki reputasi yang lebih besar untuk kehilangan (keseluruhan kelompok klien mereka) jika mereka salah melaporkan. Jika auditor dengan klien sama-sama berukuran relatif kecil, maka kemungkinan besar penghasilan auditor akan menjadi tergantung pada *fee* audit yang dibayarkan oleh

klienya, sehingga auditor kecil akan cenderung tidak independen terhadap pekerjaannya. [13].

Kegagalan audit terjadi jika auditor tidak independen secara nyata (*independent in fact*), atau jika auditor salah menerbitkan laporan audit karena gagal mengumpulkan bukti kompeten yang cukup seperti dipersyaratkan oleh standar auditing. Secara umum kegagalan audit dapat terindikasi dari adanya perkara pengadilan yang menimpa auditor, gagal bisnis, adanya pemeriksaan yang dilakukan badan (komisi) pengawas pasar modal dan penyajian kembali laporan keuangan [47].

Kualitas audit merupakan kemungkinan seorang auditor dalam menemukan kekeliruan atau penyelewengan dalam laporan keuangan keuangan klien dan kemungkinan melaporkan kekeliruan atau penyelewengan tersebut. Kantor akuntan berukuran besar dipercaya mampu memberikan kualitas audit yang lebih baik, yaitukantor akuntan publik yang merupakan bagian dari *The Big Four*. Anggota *The Big Four* diantaranya adalah *Pricewaterhouse Coopers*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Ernst & Young*, dan *KPMG*.

### 2.1.9. Perencanaan Pajak

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah [20]. Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan melalui perolehan laba maksimum. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien [48].

*Tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya

berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Tidak ada yang salah dengan melakukan perencanaan untuk menghindari pajak asalkan menggunakan metode yang legal. Ketika metode ilegal digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, proses tersebut tidak lagi dianggap sebagai *tax planning*, tetapi *tax evasion* [48].

Perencanaan perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perpajakan. *Tax planning* dapat diterapkan ketika wajib pajak akan memulai kegiatan usahanya sampai penutupan usaha (likuidasi), jika benar-benar terjadi. Perencanaan perpajakan dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, pemilihan lokasi usaha); saat menjalankan usaha (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi dan perpajakan, tanggung jawab terhadap *stakeholders*); saat akan menutup usaha (restrukturisasi usaha/perusahaan, likuidasi, merger, pemekaran, dan sebagainya) [48]. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak secara saksama, sehingga perencanaan pajak diartikan sebagai proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor nonpajak yang material untuk menentukan:

- a. apakah;
- b. kapan;
- c. bagaimana; dan
- d. dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada fenomena pajak yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan [49].

Suatu perencanaan akan membawa manfaat yang besar bila dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, perencanaan perpajakan dalam pelaksanaannya membutuhkan personil yang berkualitas, perangkat kerja yang memadai, serta prosedur kerja yang tepat waktu,

tepat jumlah dan tepat informasi. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak dilakukan secara cermat:

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat [48].

*Tax Planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.
- b. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*). Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.
- c. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, *invoice*, faktur pajak, PO, dan DO). Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*) [48].

Perencanaan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut [50]:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}} \quad (2.8)$$

Perencanaan pajak merupakan suatu proses pengorganisasian kegiatan usaha wajib pajak guna meminimalkan utang pajak, dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perencanaan pajak yang baik akan membantu perusahaan menghemat biaya pajak sehingga meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, melalui perencanaan pajak manajemen perusahaan dapat mengatur strategi aliran kas masuk dan kas keluar dengan lebih efektif, dimana efektivitas pengelolaan kas tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Nilai ETR yang rendah dapat menjadi indikator adanya kegiatan perencanaan pajak dalam perusahaan.

## 2.2. Review Penelitian Terdahulu

Adapun review dari beberapa penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. AA Ngurah Dharma Adi Putra dan Putu Vivi Lestari melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Kebijakan Dividen, Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan [4].
2. Dewi Sartika melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap Hubungan Perencanaan Pajak dengan Nilai Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 12 perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, perencanaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan [14].
3. Dwi Sukirni melakukan penelitian pada tahun 2012 dengan judul “Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Analisis terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 33 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional dan kebijakan hutang berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan [8].
4. Mafizatun Nurhayati melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul “Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan Sektor Non Jasa”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 37 perusahaan sektor non jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara parsial ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen, profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan likuiditas dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan [5].

5. Ramadhan Sukma Perdana dan Raharja melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan’. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 26 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, proporsi komisaris independen, eksternal auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional, komite audit dan eksternal auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan [10].
6. Citra Ayuning Sari Yuono dan Dini Widayawati melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak dan *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 9 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan perencanaan pajak, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, perencanaan pajak dan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan [51].
7. Aniela Nurminda, Deannes Isywardhana dan Annisa Nurbaiti melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20

perusahaan manufaktur sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan [6].

8. Titah Kinanti Kusumaningtyas melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Sri-Kehati”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 perusahaan yang terdaftar pada Indeks Sri-Kehati periode Mei sampai dengan Oktober 2014 dengan periode penelitian tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial, komposisi komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan [12].
9. Heven Manoppo dan Fitty Valdi Arie melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan struktur modal, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, struktur modal dan profitabilitas yang diukur dengan ROI berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas yang diukur dengan NPM dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan [7].
10. Diah Manda Sari, Emilia Gustini dan Lukita Tripermata melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Struktur Modal dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan perbankan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan struktur modal dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, kinerja perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan [9].

11. Ronny Catur Kushartono dan Nunung Nurhasanah melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Tergabung dalam Indeks LQ45 Periode 2010-2016. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 34 perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 periode 2010-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio pasar berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, rasio aktivitas berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. [52].

**Tabel 2.1. Review Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang diperoleh</b>
AA Ngurah Dharma Adi Putra dan Putu Vivi Lestari (2016)	Pengaruh Kebijakan Dividen, Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan	<u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)  <u>Variabel Independen:</u> a. Kebijakan Dividen (DPR) b. Likuiditas ( <i>Current Ratio</i> ) c. Profitabilitas (ROA) d. Ukuran Perusahaan (Ln(Total Aset))	<u>Secara parsial:</u> a. Kebijakan Dividen berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. b. Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. c. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. d. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan.
Dewi Sartika (2015)	Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap Hubungan Perencanaan Pajak dengan Nilai Perusahaan	<u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)  <u>Variabel Independen:</u> Perencanaan Pajak (ETR)  <u>Variabel Moderasi:</u> Kepemilikan Institusional	<u>Secara parsial:</u> a. Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap Nilai Perusahaan. b. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. c. Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan Perencanaan Pajak dengan Nilai Perusahaan.

Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Dwi Sukirni (2012)	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Analisis terhadap Nilai Perusahaan	<p><u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Kepemilikan Manajerial b. Kepemilikan Institusional c. Kebijakan Dividen (DPR) d. Kebijakan Hutang (DER)</p>	<p><u>Secara simultan:</u> Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap Nilai Perusahaan. b. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. c. Kebijakan Dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. d. Kebijakan Hutang berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan.</p>
Mafizatul Nurhayati (2013)	Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan Sektor Non Jasa	<p><u>Variabel Dependen:</u> a. Kebijakan Dividen (DPO) b. Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas (ROA) b. Likuiditas (<i>Current Ratio</i>) c. Ukuran Perusahaan (Ln(Total Aktiva))</p>	<p><u>Secara parsial:</u> a. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kebijakan Dividen. b. Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Kebijakan Dividen. c. Likuiditas perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kebijakan Dividen. d. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. e. Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. f. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. g. Kebijakan Dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p>
Ramadhan Sukma Perdana dan Raharja (2014)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan	<p><u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Kepemilikan Manajerial b. Kepemilikan Institusional c. Komite Audit d. Komisaris Independen e. Eksternal Auditor</p> <p><u>Variabel Kontrol:</u> Ukuran Perusahaan (Ln(Total Aset))</p>	<p><u>Secara simultan:</u> Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Eksternal Auditor dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. b. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. c. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. d. Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. e. Eksternal auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. f. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan.</p>

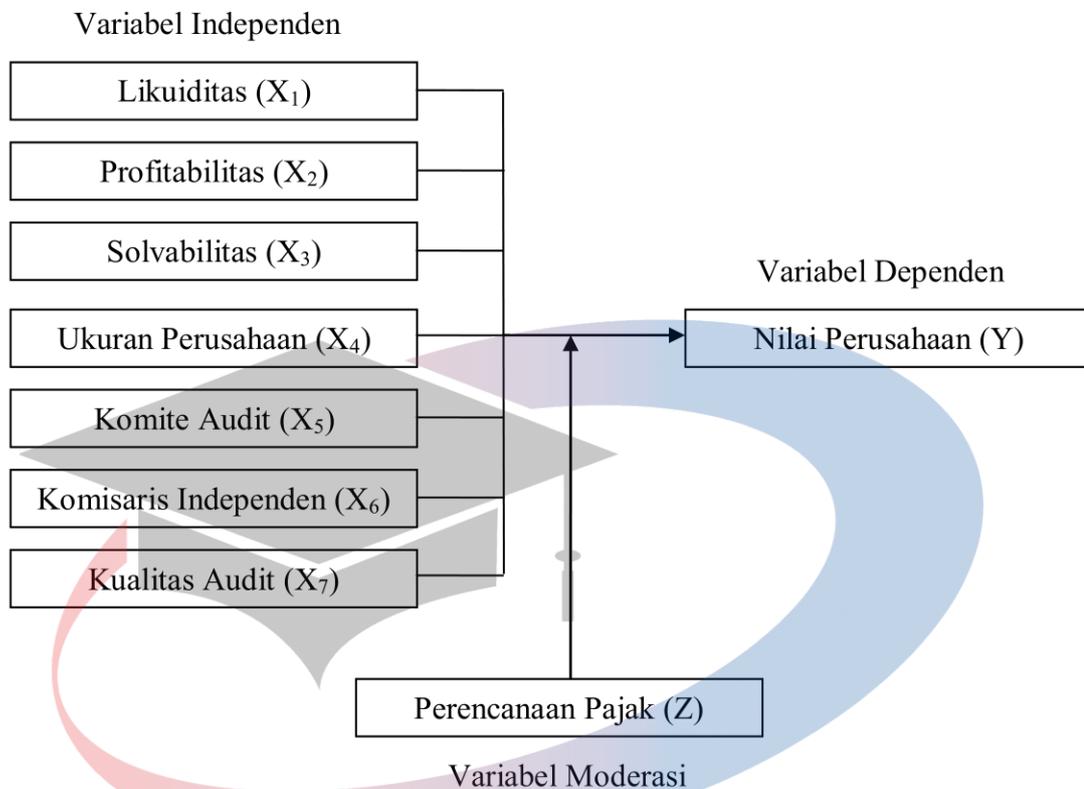
Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Citra Ayuning Sari Yuono dan Dini Widyawati (2016)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan	<p><u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Perencanaan Pajak b. Kepemilikan Manajerial c. Kepemilikan Institusional d. Komisaris Independen e. Komite Audit</p>	<p><u>Secara simultan:</u> Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. b. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. c. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. d. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. e. Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan.</p>
Aniela Nurmind, Deannes Isyuardhana dan Annisa Nurbaiti (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)	<p><u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas (ROE) b. <i>Leverage</i> (DER) c. Ukuran Perusahaan (Ln(Total Aset))</p>	<p><u>Secara simultan:</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. c. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p>
Titah Kinanti Kusumangtyas (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Sri-Kehati	<p><u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Kepemilikan Manajerial b. Kepemilikan Institusional c. Komposisi Komisaris Independen d. Kualitas Audit</p>	<p><u>Secara simultan:</u> Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komposisi Komisaris Independen dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. b. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. c. Komposisi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. d. Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p>

Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Heven Manoppo dan Fitty Valdi Arie (2016)	Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014	<p><u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Struktur Modal (DER) b. Ukuran Perusahaan c. Profitabilitas (ROI, NPM, dan ROE)</p>	<p><u>Secara simultan:</u> Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Struktur Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. b. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. c. Profitabilitas yang di ukur menggunakan <i>Return on Investment</i> (ROI) berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. d. Profitabilitas yang di ukur menggunakan <i>Net Profit Margin</i> (NPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. e. Profitabilitas yang di ukur menggunakan <i>Return on Equity</i> (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p>
Diah Manda Sari, Emilia Gustini dan Lukita Tripermat a (2016)	Pengaruh Struktur Modal dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia	<p><u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Struktur Modal (DER) b. Kinerja Keuangan (ROA)</p>	<p><u>Secara simultan:</u> Struktur Modal dan Kinerja Keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Struktur Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. b. Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Nilai Perusahaan.</p>
Ronny Catur Kushartono dan Nunung Nurhasanah (2017)	Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2010-2016	<p><u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Rasio Likuiditas (<i>Current Ratio</i>) b. Rasio Solvabilitas (DER) c. Rasio Profitabilitas (ROA) d. Rasio Aktivitas (TATO) e. Rasio Pasar (PER)</p>	<p><u>Secara simultan:</u> Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Pasar berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Rasio Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. b. Rasio Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. c. Rasio Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan. d. Rasio Aktivitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Nilai Perusahaan. e. Rasio Pasar berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan.</p>

### 2.3. Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, variabel dependen pada penelitian ini adalah Nilai Perusahaan. Variabel independen pada penelitian ini adalah Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit, sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah Perencanaan Pajak.

### 2.4. Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1. Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Melalui rasio likuiditas, pihak internal perusahaan dapat menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan dan bagi pihak eksternal perusahaan yaitu investor, penting untuk mengetahui rasio lancar dalam hal pembagian dividen, sedangkan kreditor berkepentingan dalam hal pengembalian

jumlah pokok pinjaman beserta bunga pinjaman [15]. Semakin tinggi rasio likuiditas sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi dengan baik dan mampu menciptakan laba, sehingga dapat dihasilkan penilaian akan kinerja perusahaan yang menarik perhatian investor untuk memiliki saham perusahaan. Tingginya minat investor akan saham perusahaan akan meningkatkan harga saham sehingga nilai perusahaan juga meningkat. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan [4].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub>: Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas maka menunjukkan kinerja perusahaan baik dalam menghasilkan laba. Dengan peningkatan laba perusahaan memberikan dampak positif bagi investor bahwa perusahaan dalam kondisi menguntungkan sehingga harga saham meningkat dan nilai perusahaan juga meningkat [43]. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan [6].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4.3. Pengaruh Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan**

Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya dengan memanfaatkan modal yang dimiliki. Semakin tinggi rasio solvabilitas menunjukkan resiko perusahaan tinggi karena hutang yang dimiliki perusahaan melebihi modal perusahaan itu sendiri [43]. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban finansialnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi maka dapat dikatakan kondisi tingkat kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan sehat [47], dimana kinerja yang sehat akan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh solvabilitas terhadap nilai perusahaan [7] [8].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :  
H<sub>3</sub>: Solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai aktiva [35]. Perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas guna menekan biaya keagenan [40], sehingga investor dapat mengetahui lebih banyak mengenai keadaan perusahaan guna pengambilan keputusan investasi. Kelengkapan informasi ini akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan [4] [5] [10].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :  
H<sub>4</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan**

Komite audit bertugas menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya [17]. Keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan berkualitas yang dilakukan komite audit diyakini mampu mengurangi tindak kecurangan sehingga investor lebih percaya terhadap laporan keuangan perusahaan. Akibatnya, pihak investor lebih tertarik untuk membeli saham perusahaan yang akan berdampak pada kenaikan nilai perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan [11].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :  
H<sub>5</sub>: Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4.6. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan**

Tata kelola perusahaan yang baik cenderung menjadi perhatian investor. Salah satu komponen tata kelola perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki komisaris independen. Tugas komisaris independen adalah mengawasi kegiatan manajemen dan memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan perusahaan [53]. Melalui tugas pengawasan dan nasihat yang diberikan komisaris

independen secara efektif kepada direksi, akan tercipta iklim yang lebih objektif dan independen serta kepentingan baik pemegang saham maupun *stakeholders* lainnya terjaga [45], sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan [10].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>6</sub>: Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4.7. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Nilai Perusahaan**

Kualitas audit menunjukkan ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien [47]. Alasan bahwa banyak pemakai berbeda yang ingin bergantung pada laporan akuntan publik untuk kewajaran dari laporan keuangan adalah harapan dari sudut pandang yang tidak bias [19], sehingga laporan keuangan dengan kualitas audit yang baik akan lebih disukai dan dipercaya oleh investor dan turut meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>7</sub>: Kualitas Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4.8. Kemampuan Perencanaan Pajak untuk Memoderasi Hubungan antara Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit dengan Nilai Perusahaan**

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan pajak yang dilaksanakan untuk meminimumkan beban pajak yang ditanggung perusahaan [20]. Dengan adanya perencanaan pajak, manajemen perusahaan dapat menghemat kas untuk biaya pajak serta mengatur strategi aliran kas masuk dan kas keluar dengan lebih efektif [48], sehingga selain meningkatkan laba, juga dapat mengoptimalkan efektivitas pengelolaan kas perusahaan. Hal ini akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan juga meningkat. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan [11].

Berdasarkan uraian tersebut , maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>8</sub>: Kemampuan perencanaan pajak untuk memoderasi hubungan antara likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, komisaris independen dan kualitas audit dengan nilai perusahaan.



UNIVERSITAS  
MIKROSKIL